



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 699 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa dengan adanya Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan administrasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan pasti dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

+Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 699 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 KOTA BANJARMASIN

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Daftar Dokumen SOP Management Representative (MR)

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.01/DPMPTSP/2021		SOP Pengendalian Dokumen Internal
2	065/24.02/DPMPTSP/2021		SOP Pengendalian Dokumen Eksternal
3	065/24.03/DPMPTSP/2021		SOP Pengendalian Arsip
4	065/24.04/DPMPTSP/2021		SOP Pelaksanaan Audit Internal
5	065/24.05/DPMPTSP/2021		SOP Tinjauan Manajemen
6	065/24.06/DPMPTSP/2021		SOP Tindakan Perbaikan
7	065/24.07/DPMPTSP/2021		SOP Pengendalian Hasil Yang Tidak Sesuai
8	065/24.08/DPMPTSP/2021		SOP Analisa Resiko
9	065/24.09/DPMPTSP/2021		SOP Penerbitan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dengan E-Tanda Tangan

2. Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.10/DPMPTSP/2021		SOP Penyelenggaraan Administrasi Surat Masuk dan Pengarsipan
2	065/24.11/DPMPTSP/2021		SOP Penyelenggaraan Administrasi Surat Keluar dan Pengarsipan
3	065/24.12/DPMPTSP/2021		SOP Pelaksanaan Jaminan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS/Askes
4	065/24.13/DPMPTSP/2021		SOP Pembuatan Karpeg, Karsu/Karis dan Kartu Askes Pegawai
5	065/24.14/DPMPTSP/2021		SOP Penyusunan Pemutakhiran Data Pegawai
6	065/24.15/DPMPTSP/2021		SOP Pengawasan dan Evaluasi Absensi Sidik Jari dan Manual
7	065/24.16/DPMPTSP/2021		SOP Penyelenggaraan Usul Cuti Pegawai
8	065/24.17/DPMPTSP/2021		SOP Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai
9	065/24.18/DPMPTSP/2021		SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
10	065/24.19/DPMPTSP/2021		SOP Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Pensiunan, Tanda Jasa, Tanda Penghargaan, Pengembangan Karir

			dan Pemberhentian
11	065/24.20/DPMPSTSP/2021		SOP Pengarsipan Dokumen
12	065/24.21/DPMPSTSP/2021		SOP Penyelenggaraan Rapat Internal
13	065/24.22/DPMPSTSP/2021		SOP Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
14	065/24.23/DPMPSTSP/2021		SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
15	065/24.24/DPMPSTSP/2021		SOP Pemeliharaan Lingkungan

3. Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Perencanaan

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.25/DPMPSTSP/2021		SOP Penyusunan LAKIP DPMPSTSP
2	065/24.26/DPMPSTSP/2021		SOP Penyusunan Renstra DPMPSTSP
3	065/24.27/DPMPSTSP/2021		SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah
4	065/24.28/DPMPSTSP/2021		SOP Penyusunan RKT

4. Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Keuangan

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.29/DPMPSTSP/2021		SOP Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
2	065/24.30/DPMPSTSP/2021		SOP Prosedur Pembayaran UP/ GU
3	065/24.31/DPMPSTSP/2021		SOP Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

5. Daftar Dokumen SOP Bidang Perizinan Tertentu

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.32/DPMPSTSP/2021	M	SOP Pembuatan Izin Prinsip
2	065/24.33/DPMPSTSP/2021	M	SOP Pembuatan Izin Lokasi
3	065/24.34/DPMPSTSP/2021	M	SOP Izin Mendirikan Bangunan
4	065/24.35/DPMPSTSP/2021	M	SOP Izin Usaha Angkutan Umum Kota
5	065/24.36/DPMPSTSP/2021	M	SOP Izin Usaha Angkutan Barang
6	065/24.37/DPMPSTSP/2021	M	SOP Izin Usaha Media Elektronik Informasi dan Komunikasi (IUMEIK)
7	065/24.38/DPMPSTSP/2021	M	SOP Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
8	065/24.39/DPMPSTSP/2021	M	SOP Pembuatan Izin Reklame
9	065/24.40/DPMPSTSP/2021	B1-M	Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)
10	065/24.41/DPMPSTSP/2021	C3-OSS SLF	Sertifikat Laik Fungsi
11	065/24.42/DPMPSTSP/2021	M	Izin Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan
12	065/24.43/DPMPSTSP/2021	M	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
13	065/24.44/DPMPSTSP/2021	C4 OSS	Izin Lingkungan – Amdal
14	065/24.45/DPMPSTSP/2021	C4	Izin Lingkungan _ UKL/UPL

		OSS	
15	065/24.46/DPMPTSP/2021	C1 OSS	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas Wilayah Kota Banjarmasin

6. Daftar Dokumen SOP Bidang Perizinan Jasa Usaha

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.47/DPMPTSP/2021	M	SOP Pembuatan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
2	065/24.48/DPMPTSP/2021	M	SOP Pembuatan Izin Penerjemah
3	065/24.49/DPMPTSP/2021	M	SOP Pembuatan Tanda Daftar Industri (TDI)
4	065/24.50/DPMPTSP/2021	M	SOP Izin Usaha Industri (IUI)
5	065/24.51/DPMPTSP/2021	M	SOP Pembuatan Tanda Daftar Gudang (TDG)
6	065/24.52/DPMPTSP/2021	M	SOP Pembuatan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner
7	065/24.53/DPMPTSP/2021	M	SOP Pembuatan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
8	065/24.54/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Daya Tarik Wisata
9	065/24.55/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Kawasan Pariwisata
10	065/24.56/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Jasa Transportasi Wisata
11	065/24.57/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Jasa Perjalanan Wisata
12	065/24.58/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Jasa Makanan dan Minuman
13	065/24.59/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Penyediaan Akomodasi
14	065/24.60/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
15	065/24.61/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
16	065/24.62/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Jasa Informasi Pariwisata
17	065/24.63/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
18	065/24.64/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Jasa Pramuwisata
19	065/24.65/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Wisata Tirta
20	065/24.66/DPMPTSP/2021	M	SOP Usaha Spa dan Salon Kecantikan
21	065/24.67/DPMPTSP/2021	C1- OSS	SOP Izin Pendirian satuan Pendidikan Formal-TK (KBLI 85132, 85135)
22	065/24.68/DPMPTSP/2021	C1- OSS	SOP Izin Pendirian satuan Pendidikan Formal-Sekolah Dasar (SD) (KBLI 85121)
23	065/24.69/DPMPTSP/2021	C1- OSS	SOP Izin Pendirian satuan Pendidikan Formal-Sekolah Menengah Pertama (SMP) (KBLI 85122)

24	065/24.70/DPMPTSP/2021	C1-OSS	SOP Izin Pendirian satuan Pendidikan Non Formal-Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
25	065/24.71/DPMPTSP/2021	C1-OSS	SOP Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal-KOBER (KBLI 85133)
26	065/24.72/DPMPTSP/2021	C1-OSS	SOP Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal-TPA (KBLI 85133)
27	065/24.73/DPMPTSP/2021	C1-OSS	SOP Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal-Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (KBLI 85139)
28	065/24.74/DPMPTSP/2021	M	SOP Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal-Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
29	065/24.75/DPMPTSP/2021	M	SOP Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal-Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
30	065/24.76/DPMPTSP/2021	M-OSS	SOP Surat Izin Usaha Perdagangan-Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
31	065/24.77/DPMPTSP/2021	M-OSS	SOP Surat Izin Usaha Perdagangan-Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTM)
32	065/24.78/DPMPTSP/2021	M-OSS	SOP Tanda Daftar Gudang (TDG)
33	065/24.79/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia – Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno
34	065/24.80/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia – Pengelolaan Museum
35	065/24.81/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia – Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat
36	065/24.82/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia – Pengelolaan objek ziarah; dan sub jenis lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Walikota
37	065/24.83/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha kawasan pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata
38	065/24.84/DPMPTSP/2021	C2-SIAP &	SOP TDUP – Usaha jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata

		OSS	
39	065/24.85/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha; jasa perjalanan wisata, meliputi jasa perjalanan wisata – biro perjalanan wisata
40	065/24.86/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha; jasa perjalanan wisata, meliputi jasa perjalanan wisata – cabang biro perjalanan wisata
41	065/24.87/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha; jasa perjalanan wisata, meliputi jasa perjalanan wisata – agen perjalanan wisata
42	065/24.88/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman - Restoran
43	065/24.89/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman – Rumah makan
44	065/24.90/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman – Bar/Rumah Minum
45	065/24.91/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman - Kafe
46	065/24.92/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman – Pusat jajanan makanan/foodcourt
47	065/24.93/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman – Jasa boga/catering
48	065/24.94/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman – Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota
49	065/24.95/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi – Hotel bintang
50	065/24.96/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi – Hotel non bintang
51	065/24.97/DPMPSTSP/2021	C2-SIAP	SOP TDUP – Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha

		& OSS	pengelolaan penyediaan akomodasi – Losmen
52	065/24.98/DPMPTSP/2021	C2- SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi – Rumah kos
53	065/24.99/DPMPTSP/2021	C2- SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi – Wisma (Guest House)
54	065/24.100/DPMPTSP/2021	C2- SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi – Home stay (Pondok Wisata)
55	065/24.101/DPMPTSP/2021	C2- SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi – Cottage
56	065/24.102/DPMPTSP/2021	C2- SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi – Jenis usaha lain bidang usaha penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Walikota
57	065/24.103/DPMPTSP/2021	C2- SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi – gelanggang olahraga; a) rumah bilyar; b) bowling; c) gelanggang renang; d) lapangan tenis; e) kolam pemancingan; f) gelanggang futsal; g) lapangan bulutangkis; h) lapangan golf; i) lapangan basket; j) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Walikota
58	065/24.104/DPMPTSP/2021	C2- SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi – gelanggang olahraga; a) sanggar seni; b) gallery seni; c) gedung pertunjukan seni; d) sub-jenis usaha lain dari; jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Walikota
59	065/24.105/DPMPTSP/2021	C2- SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi – arena permainan/ketangkasan; a) arena permainan ketangkasan (permainan manuai/mekanik/elektronik/lapangan airsoft gun dan/atau paint ball) untuk

			orang dewasa; b) arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga; c) sub-jenis usaha lain dari; jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Walikota
60	065/24.106/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi – hiburan malam; a) kelab malam; b) diskotik; c) pub; d) music hidup (live music); e) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Walikota
61	065/24.107/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi – taman rekreasi; a) taman rekreasi; b) taman bertema; c) taman margasatwa; d) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Walikota
62	065/24.108/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi – karaoke; a) karaoke umum; b) karaoke keluarga; c) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha karaoke yang ditetapkan oleh Walikota
63	065/24.109/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi – bioskop/cinema
64	065/24.110/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. a) penyelenggaraan pertemuan; b) penyelenggaraan perjalanan insentif; c) penyelenggaraan konferensi; d) penyelenggaraan pameran; dan e) jenis usaha lain dari jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang ditetapkan oleh Walikota
65	065/24.111/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa informasi pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata a) jasa informasi pariwisata cetak; b) informasi pariwisata elektronik; c) jenis

			usaha lain dari jenis usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Walikota
66	065/24.112/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa konsultan pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata 1) jasa konsultan pariwisata
67	065/24.113/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha jasa pramuwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata 1) jasa pramuwisata
68	065/24.114/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta 1) wisata bahari; a) wisata memancing; b) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Walikota. 2) wisata sungai; 3) wisata danau; dan 4) jenis usaha lain dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Walikota
69	065/24.115/DPMPTSP/2021	C2-SIAP & OSS	SOP TDUP – Usaha spa dan salon kecantikan, meliputi jenis usaha pengelolaan spa 1) spa sederhana 2) spa kompleks; dan 3) salon kecantikan

7. Daftar Dokumen SOP Bidang Penanaman Modal

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.116/DPMPTSP/2021		SOP Perencanaan Kegiatan Promosi Potensi Daerah
2	065/24.117/DPMPTSP/2021		SOP Kegiatan Promosi Potensi Daerah
3	065/24.118/DPMPTSP/2021		SOP Kegiatan Monitoring Perusahaan Bidang Penanaman Modal
4	065/24.119/DPMPTSP/2021	OSS	SOP Pembuatan Izin Penyelenggaraan Puskesmas
5	065/24.120/DPMPTSP/2021	M	SOP Izin Toko Obat (ITO)
6	065/24.121/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	SOP Izin Toko Obat (ITO)
7	065/24.122/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	SOP Izin Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
8	065/24.123/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	SOP Izin Tukang Gigi
9	065/24.124/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	SOP Izin Apotek
10	065/24.125/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	SOP Izin Laboratorium (Tingkat Pertama)

11	065/24.126/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)
12	065/24.127/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Penyelenggaraan Optikal
13	065/24.128/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Operasional Klinik
14	065/24.129/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional)
15	065/24.130/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin PKRT (Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga)
16	065/24.131/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Praktek Dokter Hewan
17	065/24.132/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Petshop
18	065/24.133/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Penitipan Hewan
19	065/24.134/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
20	065/24.135/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
21	065/24.136/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP)
22	065/24.137/DPMPTSP/2021	C5-OSS PM	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

8. Daftar Dokumen SOP Bidang Data dan Sistem Informasi

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.138/DPMPTSP/2021		SOP Penyusunan Data Realisasi Perizinan
2	065/24.139/DPMPTSP/2021		SOP Kegiatan Pelayanan Informasi Perizinan
3	065/24.140/DPMPTSP/2021		SOP Penerimaan Tamu
4	065/24.142/DPMPTSP/2021		SOP Front Office
5	065/24.143/DPMPTSP/2021		SOP Pemeliharaan Server
6	065/24.144/DPMPTSP/2021		SOP Pemeliharaan Jaringan IT

7	065/24.145/DPMPTSP/2021		SOP Back Up Data
8	065/24.146/DPMPTSP/2021		SOP Pemantauan Ketelitian Pemeliharaan Berkas

9. Daftar Dokumen SOP Bidang Pengkajian dan Pengembangan

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.147/DPMPTSP/2021		SOP Pengembangan dan Inovasi Pelayanan
2	065/24.148/DPMPTSP/2021		SOP Pengkajian Regulasi

10. Daftar Dokumen SOP Bidang Pengendalian Mutu

No	Nomor Dokumen	Status	Nama Dokumen
1	065/24.149/DPMPTSP/2021		SOP Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	065/24.150/DPMPTSP/2021		SOP Pengaduan Perizinan dengan Peninjauan Lapangan
3	065/24.151/DPMPTSP/2021		SOP Pengaduan Perizinan Tanpa Peninjauan Lapangan
4	065/24.152/DPMPTSP/2021		SOP Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

WALI KOTA BANJARMASIN

